



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Rasiei

RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2026

Kebijakan umum pembangunan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan dewasa ini ditekankan pada adanya keterkaitan fungsional dengan kawasan sekitarnya dan dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk menyerahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada Umumnya dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun kedepan serta harus mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apa yang hendak dicapai oleh SKPD dalam 1 (Satu) tahun kedepan.
2. Bagaimana cara mencapainya .
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Besaran Capaian Program tentunya disesuaikan dengan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia itu sendiri, Dalam hal ini Potensi Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan serta Potensi Pendanaan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk capaian Program dimaksud.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat dijadikan acuan Pengukuran Kinerja Pembangunan dibidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Teluk Wondama dan perlu dukungan berupa Pendanaan ataupun kebijakan sektor lain.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menggambarkan kebijakan Program Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama dimasa datang, walaupun belum begitu sempurna diharapkan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pembangunan dibidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan ditingkat Kabupaten.

Rasiei, Juni 2025

Kepala Dinas Transmigrasi Dan
Tenaga Kerja
Kab. Teluk Wondama



NIP. 19710609 200605 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	19
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi kepala Kedaerah.....	21
2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD.....	21
2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting dan Strategis dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas.....	22
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dalam Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun 2025	11
2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
3.	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	20
4.	Review Terhadap Rencana Awal RKPD	28
5.	Rencana Program Kerja dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	39

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1.	Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi Kab. Teluk Wondama	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Transmigrasi mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta paratur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja (RENJA) dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategis dan target kinerja Dinas Transmigrasi. Dengan kata lain melalui RENJA akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Transmigrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sector Transmigrasi dan Tenaga Kerja selama kurun waktu 1 (Tahun) tahun 2026.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kerja agar pembangunan dibidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat terarah dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Permenpan RB 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

14. Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat tahun 2012-2031;
16. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Wondama tahun 2005-2025;
17. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Teluk Wondama selama 1 (satu) tahun 2026

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama dalam menjalankan TUPOKSI serta instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja;
2. Sebagai pedoman dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja dan pelayanan Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di embannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama tahun 2026 adalah sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakan pembangunan disektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui berbagai

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sector Transmigrasi dan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun 2026, serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka dasar penulisan Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Gambaran penjabaran hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan lalu dan gambaran capaian renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang disajikan pada bagian ini adalah :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional seperti SPM dan SDGs
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
5. Formulasi isu-isu penting dan strategis sebagai catatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Gambaran uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan penjelasan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Gambaran hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan publik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui usulan musrenbang

BAB III. TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Gambaran arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Gambaran mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rujukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah samapai tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Tenaga Kerja									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan layanan administrasi perkantoran								
		Nilai Sakip OPD	B	B	B	B	100 %	B	B	100%
	URUSAN TENAGA KERJA									
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja									
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan unit kompetensi								
	Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	30 Org	30 org	79 Org	52 Org	68,07 %	100 Org	100 Org	100 %
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	0	0	0	20 Unit	20 Unit	100%
	Program Penempatan Tenaga Kerja									

				Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									
				Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang	42 Orang	50 Orang	44 Orang	88 %	50 Orang	50 Orang	100 %
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencaker Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Org	50 Org	90 Orang	90 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan	0	0	0	0	0	0	0	0
				Program Hubungan Industrial									
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serja Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	13 Distrik	13 distrik	6 Distrik	6 distrik	100%	6 distrik	6 distrik	100%
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah dan Perkara Perselisihan yang	3 Kasus	3 Kasus	0	0	0	0	0	0
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	0	0	0	0	0	2529 Orang	2529 Orang	100%

					Keluarga									
					URUSAN TRANSMIGRASI									
					Program Perencanaan Transmigrasi									
					Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi									
					Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang bisa Dibangun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
					Penatausahaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
					Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigrasi Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	45 KK	45 KK	45 KK	45 KK	100%	25 KK	25 KK	100 %
					Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang memenuhi kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang)	15 KK	15 KK	25 KK	25 KK	100%	0	0	0
					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 KK	10 KK	0	0	0	0	0	0

				Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran /Transmigran yang Mendapat Penyuluhan	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	100%	25 KK	25 KK	100 %
				Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	0 %
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi									
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian									
				Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satua Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	80 KK	80 KK	110 KK	110 KK	100 %	25 KK	25 KK	100 %
				Penguatan Intrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satua Permukiman	Jumlah Satua Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Intrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	100%	1 SP	1 SP	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPM, terhadap IKK yang tercantum dalam RPJMD atau Renstra Perangkat Daerah dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Analisis pencapaian kinerja Perangkat Daerah seperti tabel. 2.2. berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Teluk Wondama

No	Indikato	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	2025 (berjalan)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	2025 (berjalan)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perkantoran			100	100	100	100	97	100	100	100	
2	Nilai Sakip OPD			B	B	B	B	B	B	B	BB	BB
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi			79 Org	80 Org	128 Org	128 Org	52 Org	80 Org	128 Org	128 Org	
4	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			0 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	
5	Pelayanan Antar Kerja											
6	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			90 Org	90 Org	200 Org	200 Org	90 Org	90 Org	200 Org	200 Org	
7	Perluasan Kesempatan Kerja			0 Org	0 Org	2 Org	2 Org	0 Org	0 Org	2 Org	2 Org	
8	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan			0 Org	0 Org	2 Org	4 Org	0 Org	0 Org	2 Org	4 Org	
9	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI dan Pekerja yang			6 Distrik	13 Distrik	13 Distrik	13 Distrik	6 Distrik	13 Distrik	13 Distrik	13 Distrik	

	terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan											
10	Jumlah Perselisihan yang dicegah dan Perkara Perselisihan yang			0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	
11	Terlaksananya Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Keluarga			0 Org	2529 Org	3000 Org	3500 Org	0 Org	2529 Org	3000 Org	3500 Org	
12	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang bisa Dibangun			0	1	0	0	0	1	0	0	
13	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi			0	1	0	0	0	1	0	0	
14	Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya			45 KK	50 KK	50 KK	50 KK	45 KK	50 KK	50 KK	50 KK	
15	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang memenuhi kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang)			25 KK	0 KK	50 KK	50 KK	25 KK	0 KK	50 KK	50 KK	
16	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan			0 KK	0 KK	40 KK	40 KK	0 KK	0 KK	40 KK	40 KK	
17	Jumlah Calon Transmigran /Transmigran yang			50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	

	Mendapat Penyuluhan											
18	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi			0 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	
19	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			110 KK		125 KK	125 KK	110 KK		125 KK	125 KK	
20	Jumlah Satua Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan			1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang disajikan pada bagian ini adalah :

2.3.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan Dinas Transmigrasi dalam menunjang program Pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama yang telah dan sedang dilaksanakan adalah :

Bidang Transmigrasi

- Pembukaan areal kawasan transmigrasi di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Teluk Duairi dan Distrik Werianggi;
- Pembangunan permukiman dan fasilitas penunjang warga transmigrasi;
- Melakukan pendataan, seleksi dan Penempatan warga transmigrasi pada lokasi permukiman transmigrasi yang ada;
- Pembinaan dan pemberdayaan warga transmigrasi dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya, pertanian, peternakan dan lain-lain;
- Membuka akses perekonomian dari lokasi transmigrasi ke ibu kota Distrik dan atau ibu kota Kabupaten;
- Memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan warga transmigrasi dalam berbagai kegiatan dibidang pertanian, peternakan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi.

Bidang Ketenagakerjaan

- Penyusunan perencanaan tenaga kerja;
- Penyebarluasan informasi pasar kerja;
- Pendataan dan penerbitan kartu pencari kerja;
- Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja;
- Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- Peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui kursus-kursus singkat;
- Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan;
- Pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB);
- Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Penyusunan dan pengusulan formasi serta pembinaan kepada mediator, konsiliator;
- Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- Pembinaan kepeseraan jaminan sosial tenaga kerja;
- Pembinaan dan sosialisasi penetapan Upah Minimum Provinsi kepada perusahaan;
- Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;
- Pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;

- Pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - Penerbitan rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 - Penanganan kasus dan melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan;
 - Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis;
 - Fasilitas pembinaan pengawasan ketenagakerjaan;
- Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama dalam melaksanakan pelayanan adalah dapat di lihat pada tabel 2.3.2. berikut ini :

Tabel. 2.3.1. Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Tugas dan Fungsinya

INTI MASALAH	POHON MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH	URUSAN
(1)	(2)	(1)	(4)	(5)
Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Masih Tendah	Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Masih Tendah	Belum adanya Perencanaan Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
			Masih Rendahnya Ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja	
			Terbatasnya Lapangan/ Kesempatan Kerja	
			Rendahnya Perlindungan hak-hak dasar Tenaga Kerja	
Kapasitas Perekonomian Lokal Rendah	Produktivitan Perekonomian di Kawasa Transmigrasi Masih Rendah	Pengembangan Kawasan Transmigrasi belum Maksimal	Perencanaan Kawasan Transmigrasi belum lengkap	Transmigrasi
			Belum Maksimalnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional seperti SPM dan SDGs

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelayanan suatu organisasi perangkat daerah sesuai target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi guna mengetahui faktor-faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja dapat dilakukan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisa SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

- ▶ Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Teluk Wondama;
- ▶ Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal

2. Kelemahan (Weakness)

- ▶ Rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- ▶ Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang belum merata.

- Lingkungan eksternal meliputi :

1. Peluang (Opportunities)

- ▶ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ▶ Nuansa memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan;

2. Ancaman (Threats)

- ▶ Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan;
- ▶ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

- 2.3.5. Formulasi isu-isu penting dan strategis sebagai catatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

1. Permasalahan daerah

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini.

Mengacu pada tatacara pengelompokan permasalahan daerah yang dianalisis dari Permendagri 86 tahun 2017, lalu dikaitkan dengan analisis kondisi gambaran umum daerah yang disajikan pada Bab 2, maka ada lima aspek utama yang perlu dikaji yaitu aspek ekonomi, aspek pembangunan manusia, aspek pengembangan sarana prasarana dan lingkungan hidup serta aspek tata kelola pemerintahan. Dalam menganalisis Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Teluk Wondama dilakukan dengan pendekatan Analisis Pohon Masalah terhadap aspek-aspek pembangunan yang dianggap berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan. Analisis permasalahan pembangunan daerah dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan kinerja sumber daya manusia di Kabupaten Teluk Wondama masih sangat tertinggal dengan kab/kota di Provinsi Papua Barat, terutama jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar kawasan Kuriwamesa. Demikian halnya apabila di bandingkan dengan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat. Ketertinggalan kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh faktor-faktor multidimensi seperti permasalahan sektor pendidikan yang terdiri dari : masih rendahnya Angka Rata- rata Lama Sekolah, yang diakibatkan oleh Angka Partisipasi Murni pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya 7,38%.. Rendahnya Angka Partisipasi Murni pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebabkan oleh pemenuhan fasilitas pendidikan yang belum merata pada semua distrik, tenaga pendidik yang kurang, akses ke fasilitas pendidikan yang cukup mahal dan pola pikir orang tua yang masih rendah terhadap pendidikan

Permasalahan di bidang kesehatan yang turut mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu masih terbatasnya dokter spesialis, alat kesehatan dan penyediaan obat yang belum memenuhi standar sehingga angka rujukan tinggi, tingkat kesadaran masyarakat ke fasilitas kesehatan masih rendah, layanan kesehatan belum optimal yang berdampak terhadap masih tingginya angka kematian penduduk,. Akar Permasalahan di bidang kesehatan ini berakibat pada masih tingginya angka morbiditas (kesakitan) 2,79 sehingga berdampak pada masih rendahnya Angka Harapan Hidup yang hanya 60,86 tahun. Masalah rendahnya kualitas hidup penduduk di Kabupaten Teluk Wondama ikut dipengaruhi oleh akar Permasalahan yang bersumber dari Bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan KB yang terpotret dari masih tingginya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Permasalahan di bidang peningkatan kualitas tenaga kerja dan permasalahan pada peningkatan kapasitas perempuan dan pemberdayaan masyarakat berkategori PMKS.

Akumulasi dari akar masalah yang ada pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan yang disebutkan di atas menjadi penyebab dari masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Teluk Wondama. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan ekonomi. Jadi kualitas sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi menjadi dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sebab kondisi ekonomi penduduk memiliki pengaruh yang besar terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia.

1.2. Daya Saing Perekonomian Masih Rendah

Potret Permasalahan ekonomi tercermin pada beberapa hasil analisis sektorekonomi, yang memperlihatkan dengan jelas akar masalah di Urusan Pariwisata yaitu masih rendahnya sumber daya manusia pengelola wisata, ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur pendukung yang masih sangat terbatas. Pada Sektor Perikanan juga turut memberikan kontribusi masalah yaitu walaupun memiliki potensi yang besar namun belum memberikan kontribusi kesejahteraan. Kondisi ini disebabkan oleh produksi sektor perikanan yang masih rendah disebabkan oleh akar masalah rendahnya keterampilan nelayan, pola pikir yang belum maju, serta sarana prasarana perikanan budidaya yang terbatas,

Hal yang sama terjadi pada Sektor Pertanian yang turut memberikan kontribusi masalah terhadap ekonomi daerah, yaitu produktifitas masih rendah dan cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir. Masalah ini disebabkan oleh lahan pertanian yang terbatas, pola pikir petani masih rendah, dan sistem bertani yang masih tradisional. Adapun pada Sektor Industri dan Perdagangan memiliki kontribusi masalah yaitu belum berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah yang disebabkan oleh akar masalah jiwa wirausaha rendah, dan industri kecil berbasis komoditas unggulan belum bertumbuh sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekonomi daerah.

Pada aspek tata kelola kelembagaan yang turut memberikan kontribusi masalah bagi ekonomi daerah adalah pengelolaan dan penggunaan dana desa/kampung belum tepat sasaran, hal ini berdampak pada BUMDes yang berhasil hanya 10%.

Permasalahan sektoral yang disebutkan di atas secara akumulatif berdampak besar terhadap kondisi ekonomi di Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini tercermin dari struktur ekonomi sektoral yang memperlihatkan bahwa ekonomi Kabupaten Teluk Wondama masih bertumpuh pada sektor-sektor yang berbasis pada layanan jasa pemerintah yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 28,13%, konstruksi sebesar 17,91% dan jasa pendidikan dengan kontribusi 3,23%. Jadi hampir setengah dari struktur ekonomi Kabupaten Teluk Wondama merupakan kontribusi dari sektor jasa layanan pemerintah. Ini menandakan bahwa sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada masyarakat tidak berkembang secara optimal. Perlu ada perbaikan dalam rangka menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada masyarakat ini seperti sektor pariwisata, sektor perikanan, sektor pertanian dan sektor industri.

Tidak berkembangnya sektor-sektor tersebut menyebabkan pendapatan per kapita penduduk masih rendah dengan hanya Rp. 1.990.833; demikian juga konsumsi rumah tangga

rendah. Masalah ini berdampak pada tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat yang dampaknya akhirnya menyebabkan masih tingginya penduduk miskin.

1.3. Masalah Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Berdasarkan uraian kinerja tata kelola pemerintahan, maka dirumuskan beberapa faktor penyebab kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Teluk Wondama belum optimal disebabkan oleh adanya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah yang belum optimal dan belum membaiknya reformasi birokrasi. Kedua permasalahan ini disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu kinerja pencegahan korupsi (MCP) yang masih rendah, pelaksanaan delapan area perubahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, penerapan e-Government yang belum berjalan dengan baik. Akar masalah lain yang juga turut memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah adalah penyusunan perencanaan yang hanya bersifat bisnis as usual (hanya kebiasaan) atau bersifat formalitas tanpa menggunakan perencanaan sebagai alat control dan alat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi daerah. Terdapat juga akar masalah yang lain yaitu masih terjadi tumpang tindih tupoksi akibat SOTK yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan akar masalah yang tidak kalah penting dalam kinerja tata pemerintahan yaitu ketersediaan data. Hampir sebagian besar OPD tidak memiliki data terkait dengan kinerja serta data-data pendukung lainnya. Kondisi ini menjadi sesuatu hal yang tidak pernah diperbaiki atau diperhatikan perangkat daerah.

1.4 Masalah Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Masalah lingkungan hidup dan kebencanaan adalah Kabupaten Teluk Wondama memiliki kerentanan bencana yang tinggi, dan kondisi ini menyebabkan memiliki resiko bencana yang tinggi pula. Dua masalah ini berdampak terhadap kapasitas daerah terhadap bencana menjadi rendah. Akar permasalahannya adalah adaptasi masyarakat di kawasan rawan bencana masih rendah, karena masyarakat memiliki tingkat pengetahuan terhadap bencana yang kurang, serta masih ada masyarakat yang bermukim di kawasan daerah aliran sungai yang notabene menjadi daerah kewan bencana.

1.5 Masalah Kualitas Infrastruktur Dasar Rendah

Masalah Kualitas Infrastruktur dasar masih belum memadai, ini terlihat Kondisi permukiman yang mantap jalan tahun 2024 hanya 13,24%, Akses Air Minum Layak masih sangat rendah ini tercermin Rumah tangga berkeseluruhan Air minum Layak 23,12%, Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak 58,52% dan Pembangunan Drainase belum dibangun secara baik

2. Isu Strategis Daerah

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dari pemahaman tersebut, maka secara substansi berdasarkan permasalahan yang dimilikinya isu strategis di Kabupaten Teluk Wondama, yaitu :

Isu Startegis Global

Hasil penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional, dirumuskan isu sebagai berikut :

- Perubahan Iklim : Berdampak terhadap rusaknya ekosistem dapat berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan antara manusia dan lingkungan hidup sehingga terjadinya potensi bencana alam.
- Revolusi Industri 4.0 : Penerapan industrialisasi dalam segala aspek kehidupan suatu saat akan dilakukan oleh mesin, sehingga tenaga manusia kurang dibutuhkan.
- Green Economic Global. Pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan. Pengembangan Energi Alternatif/Energi Terbarukan. Panas Bumi, Energi Biomasa, Tenaga Surya, Bahan Bakar Nabati

Isu Strategis Nasional

Isu strategis hasil Penelaahan RPJMN 2019-2024, terdiri dari :

- Perhubungan Udara : Pembangunan Bandara Baru
- Pembangunan Jalan : Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Barat
- Kesehatan : Pengendalian penyakit menular, Telemedicine, Pengendalian Stunting,
- Pekerjaan Umum, dan Perumahan : Sanitasi Lingkungan, Jalan Strategis, Air Minum, Perumahan dan Permukiman
- Pariwisata : Pengembangan ekowisata
- Perindustrian : Pengembangan UMKM dan IKM
- Pangan : Peningkatan Ketahanan Pangan
- Perikanan dan Kelautan : Peningkatan produksi tangkap dan budidaya

Isu Strategis Regional

Hasil penelaahan terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat , dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia : Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (Kelas 1 SMP), Tingkat putus sekolah/tidak memiliki Ijazah SD 23,20%, APM SMP masih rendah (68,29%), APM PT (20,55%), Tingkat Pendidikan Tinggi 8,69%, Angka Putus Sekol 54%. Angka Harapan Hidup =..... Thn, Penduduk Miskin di PB = %, Daerah rentan pangan masih cukup tinggi 31,76%,
- Konektivitas Wilayah :
- Ekonomi :
- Lingkungan Hidup : Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi

Isu Strategis Daerah

Isu strategis hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Teluk Wondama, maka terdapat beberapa isu spasial yang terdiri dari :

- Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Bonus Demografi saat ini akan menjadi penduduk non produktif dimasa depan yang sangat besar
- Kota berkelanjutan dan ramah lansia dan anak dan apabila tidak difujudkan akan berdampak pada kesehatan dan tingkat kematian
- Persaingan ekonomi global
- Tata kelola Pemerintahan berorientasi pada Digital
- Perubahan ekstrim berdampak terhadap eksistensi lingkungan hidup dan ekosistem

Isu strategis hasil penelaahan terhadap pelaksanaan RPJMD Periode sebelumnya (2016-2021)

- Belum tercapainya sasaran pembangunan bidang ekonomi
- Walaupun target indikator IPM tercapai, namun masih menunjukkan angka yang rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Papua Barat dan Kabupaten sekitar Wilayah Kuriwamesa, (60,10)
- Angka kemiskinan masih tinggi, (30,91%)
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah (6,98%)
- Persentase PAD terhadap Pendapatan masih rendah (2,72%)
- Angka Partisipasi Murni SMP masih rendah (66,36%) jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat
- Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah (60,10 Th) jika dibandingkan dengan Provinsidan Kabupaten di Wilayah Kuriwamesa
- Pendapatan Perkapita Teluk Wondama masih rendah (Rp.8.219 Jt) jika dibandingkan dengan 3 Kabupaten di Wilayah Kuriwamesa

Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ada 17 (Tujuh Belas) isu Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang perlu diperhatikan dan diwujudkan oleh pemerintah daerah dan menjadi fokus pemerintah dan secara global. Dari hasil kajian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka dirumuskan ada 9 (sembilan) isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Teluk Wondama, yaitu :

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
- Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Kualitas Pendidikan yang belum Optimal
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Ketahanan Pangan
- Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat
- Peningkatan Infrastruktur dan Pariwisata

- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan penjelasan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan Transmigrasi										

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan publik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui usulan musrenbang. Penjelasan yang perlu disajikan pada bagian ini yaitu : 1) menjelaskan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2) Menjelaskan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Teluk Wondama

Nama Perangkat Daerah : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Pembuat Abon Ikana	UPTD BLK	Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Abon Ikan	32 Orang	Usulan masyarakat
2	pelatihan tata boga	UPTD BLK	Jumlah Peserta Pelatihan tata boga	32 Orang	Usulan masyarakat
3	pelatihan anyaman Jaring	UPTD BLK	Jumlah Peserta Pelatihan anyaman Jaring	32 Orang	Usulan masyarakat
4	Pelatihan Komputer	UPT BLK	Jumlah Peserta Pelatiha Komputer	32 Orang	Usulan DPRK

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah :

- Melanjutka pengembangan Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif,dan agromaritim
- Memperkuat pembangunan SDM,Sains, Pendidikan,Kesehatan, kesetaraan jender, Pemuda dan Penyandang disabilitas.
- Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja didasarkan atas rujukan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah adalah:

Tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja:

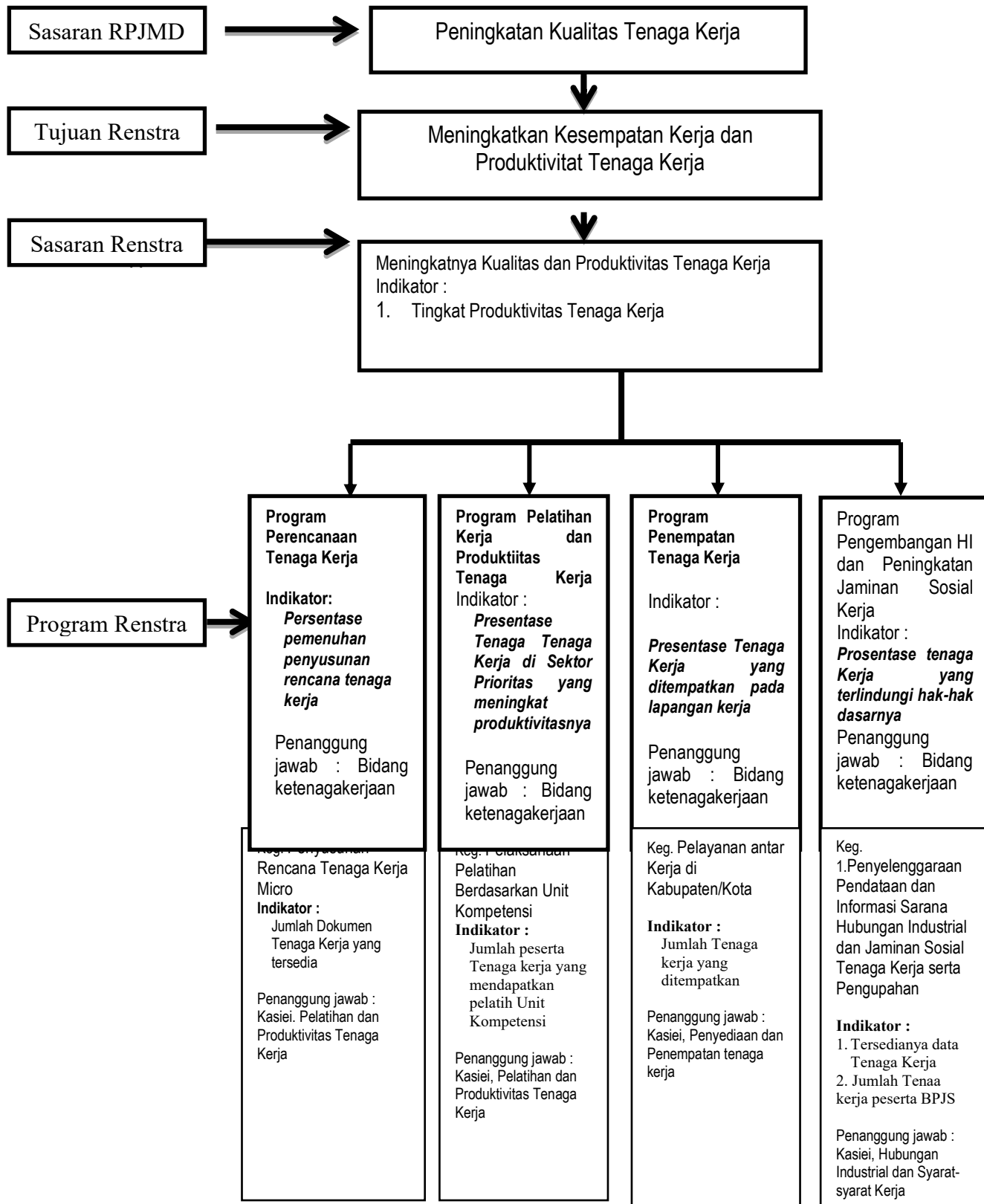
- a. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Produktivitat Tenaga Kerja
- b. Terwujudnya Pengembangan Kawasan transmigrasi
- c. Meningkatnya Angkutabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut:

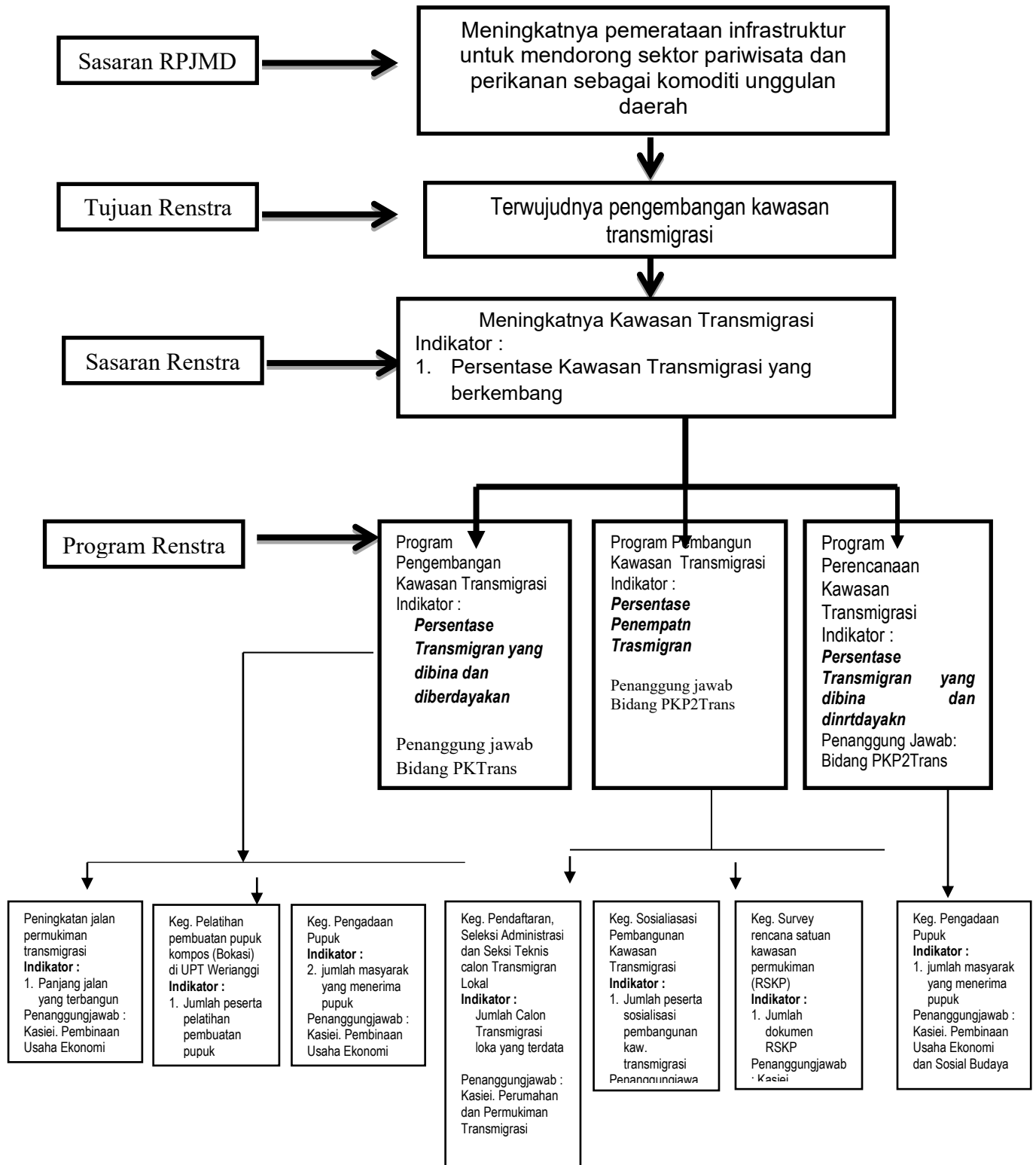
1. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Kawasan Transmigrasi
3. Meningkatnya Angkutabilitas Perangkat Daerah

1. Pohon Kinerja

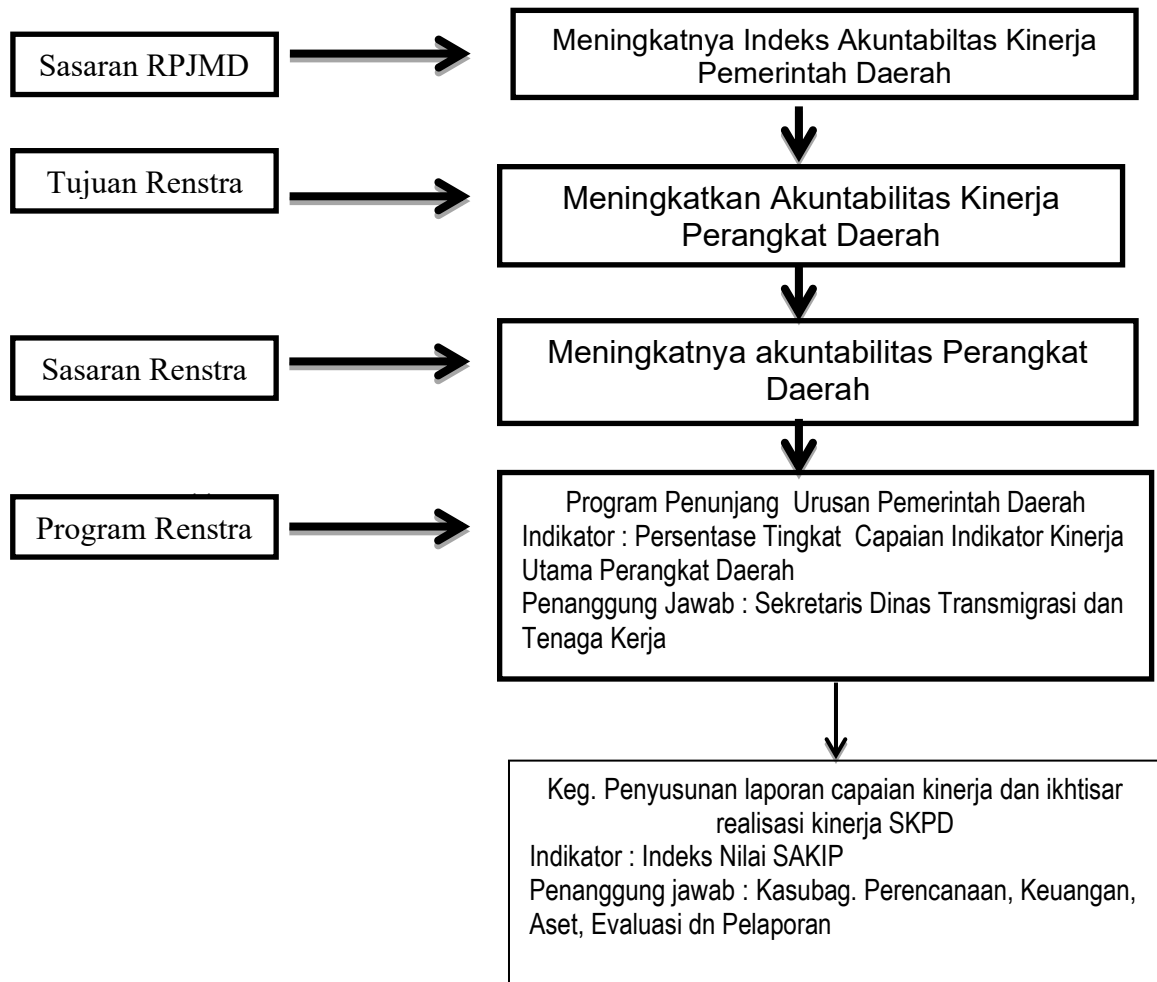
Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya



Misi 2 : Pembangunan dan pengembangan wilayah



Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



3.3. Program dan Kegiatan

Visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2030 sebagai wujud dari janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye. Sedangkan tujuan merupakan pernyataan dari suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2030 adalah

“Mewujudkan Wondama Sebagai Tanah Peradaban Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat”

Penjabaran visi di atas sebagai berikut :

Dalam Visi ini ada 4 (Empat) komponen utama pembentuk Visi yaitu :

1. Tanah Peradaban
2. Aman
3. Sejahtera dan
4. Bermartabat

Makna yang terkandung dari ketiga komponen visi di atas dikaji secara Filosofis dan Empirik, sebagai berikut :

Makna Filosofis

1. Tanah Peradaban
Secara filosofis Makna Tanah Peradaban adalah ruang hidup yang sarat nilai, tempat bertumbuhnya kebijaksanaan, etika, dan kemajuan manusia yang harmonis dengan alam dan sesama. Ia bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sumber identitas, martabat, dan tanggung jawab bersama. Dalam makna tersebut, maka secara filosofis Tanah peradaban dipahami konteks peradaban di Kabupaten Teluk Wondama yaitu Menjadikan Wondama sebagai Tanah Peradaban Orang Papua tempat awal mengenal baca tulis. Wondama sebagai pusat kemajuan social, budaya, dan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai local dan kearifan leluhur.
2. Aman
Secara filosofis Aman adalah kondisi ideal manusia yang mencakup keberadaan fisik, batin, social dan spiritual yang bebas dari ancaman, penuh harmonis dan bermartabat, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dengan alam dan Tuhan. Dalam makna

tersebut, maka secara filosofis Aman dipahami dalam konteks cita-cita pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama yaitu Mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang damai, tertib, bebas dari konflik sosial, kriminalitas, dan ancaman terhadap ketahanan sosial maupun ekologi dan menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sejahtera

Makna Filosofis dari Sejahtera adalah kondisi ideal manusia yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, sesama, dan alam semesta- mencapai kebahagiaan sejati melalui keseimbangan, keadilan, kebajikan, dan makna hidup. Dalam makna tersebut, maka secara filosofis Sejahtera dipahami dalam konteks cita-cita pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama yaitu Meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya secara bijak dan lestari.

4. Bermartabat

Makna filosofis dari Bermartabat adalah pengakuan dan perwujudan nilai kemanusiaan yang melekat dalam diri setiap individu, melalui kebebasan, etika, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Orang yang bermartabat hidup dengan integritas, menolak dijadikan alat, dan memperjuangkan kehidupan yang adil dan beradab.. Dalam makna tersebut, maka secara filosofis Bermartabat dipahami dalam konteks cita-cita pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama yaitu Mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua dan seluruh penduduk Wondama melalui perlindungan budaya, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan, serta mewujudkan keadilan sosial dan pengakuan terhadap identitas dan kontribusi seluruh kelompok masyarakat.

Selain ditinjau dari makna filosofisnya, visi juga perlu ditinjau dari makna empiriknya, yaitu

Makna Empirik

1. Tanah Peradaban secara empirik mengandung arti : suatu perubahan atau kemajuan yang menyangkut tata nilai perilaku dari manusia atau bangsa.
Untuk mengukur keberhasilan komponen Visi Peradaban melalui indikator : **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Semakin tingginya **Indeks Pembangunan Manusia** menjadi indikasi bahwa terwujudnya peradaban.
2. Aman secara empirik mengandung arti : Perlindungan untuk menciptakan ketertiban, ketenangan yang membuat individu dan masyarakat merasa terlindungi dan tentram.
Untuk mengukur komponen visi Keadilan melalui indikator :

3. Sejahtera secara empirik mengandung arti : suatu kondisi individu dan masyarakat dapat hidup layak, sehat, aman, dan bahagia.
Untuk mengukur keberhasilan komponen Visi Peradaban melalui indikator : ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***. Semakin tingginya ***Indeks Pembangunan Manusia*** menjadi indikasi bahwa terwujudnya kesejahteraan.
4. Bermartabat secara empirik mengandung arti : dimana seseorang atau masyarakat dihargai dan dihormati, dipenuhi hak-haknya, diperlakukan secara adil dan manusiawi, menjalani hidup dengan etika, integritas, dan kesadaran dan harga diri.
Untuk mengukur keberhasilan komponen Visi Bermartabat Masyarakat Wondama diukur melalui indikator : ***Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM)***

Misi

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi memberikan gambaran dan batasan terkait dengan pencapaian tujuan. Untuk itu misi pembangunan daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan untuk mendukung derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik

Dalam rangka mewujudkan maksud di atas, maka upaya peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Memperkuat sistem pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan berbasis kearifan lokal. Mendorong penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pendidikan melalui pelatihan, insentif, dan pemerataan penempatan. Pengembangan infrastruktur pendukung kesehatan dan pendidikan secara merata, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

2. Bemberdayaan Perekonomian Lokal, Sosial dan Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berakal pada nilai-nilai dan identitas masyarakat setempat. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan pendampingan usaha agar mampu bersaing secara produktif dan inovatif. Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal melalui revitalisasi tradisi, seni, Bahasa daerah, dan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan sosial yang ber karakter. Membangun jejaring kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga adat dalam rangka memperkuat kelembagaan ekonomi dan budaya masyarakat. Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi dan budaya yang adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan integritas kinerja pemerintah daerah yang meliputi kinerja aparatur, dan kinerja tata birokrasi. Kinerja apatur yang produktif dan berintegritas diwujudkan melalui menumbuh kembangkan kemampuan, dan profesionalitas serta disiplin kerja yang tinggi. Sedangkan tata birokrasi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui hasil kerja yang nyata, berkualitas, sehingga ada dampak atau tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Kinerja dari tata birokrasi yang baik ini tercermin melalui hasil kinerja yang dihasilkan.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Otonomi Khusus yang Mensejahterakan;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pelaksanaan Otonomi Khusus untuk mamastikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan Infastruktur, sesuai dengan tujuan Otsus yaitu Wondama Cerdas, Wondama, Sehat dan Wondama Produktiv.

5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Muda Diakses;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga kewilayah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Mewujudkan konektivitas antarwilayah yang efisien dan berkelanjutan guna mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi local. Mendorong pembangunan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan, Mengembangkan infrastruktur strategis berbasis potensi dan karakteristik wilayah, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta. Serta memastikan infrastruktur mendukung pelayanan public yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pariwisata, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

6. Pembangunan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ekosistem yang Berkelanjutan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan baik lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Prinsip penguatan daya dukung lingkungan bertujuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan. Dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan fisik dan social ini akan menjadi kunci dari mempertahankan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Tidak hanya pembangunan lingkungan secara fisik untuk menjamin pembangunan berkelanjutan perlu juga perhatian pada daya dukung lingkungan sosial. Daya dukung lingkungan social diwujudkan melalui adanya perwujudan keseimbangan antara pembangunan lingkungan yang harmonis dan lestari yang memperhatikan dan menghormati ruang hidup masyarakat, tata nilai sosial, hak-hak masyarakat adat, dan tata nilai kehidupan adat lainnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2026 serta Tolak Ukur Kinerja Sasaran dan Prakiraan
Maju Tahun 2027

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD	Indeks Nilai Sakip	B		10.000.000	DAU		BB	12.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji	45 ASN					48 ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK	1 Paket		25,026,400			1 Paket	25,026,400
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase disiplin aparatur							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM II , III dan IV	4 ASN	Manokwari	128.000.000			4 ASN	130.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepegawaian	2 ASN		30.000.000			2 ASN	35.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat RENSTRA	2 ASN		30.000.000			2 ASN	35.000.000
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM	4000 Liter		60,000,000			4000 Liter	60.000.000

			Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Barang cetak dan penjilitan	5000 L			20,000,000	5000 L	20.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30 Kali			30,000,000	30 Kali	350.000.000
				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 Kali			150,000,000	10 Kali	160.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos	500 Pcs			9,000,000	500 Pcs	9.000.000
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kendaraan Operasional	2 Unit			360,000,000	2 Unit	360.000.000
			Penyediaan jasa pelayan umum kantor	Jumlah Tenaga Honorer	3 Orang			57,600,000		
				Biaya Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang			40,800,000	2 Orang	40,800,000
				Operasional UPT Tranmigrasi Weriangi	12 Bulan			30.000.000	12 Bulan	36..000.000
				Operasional UPTD BLK	12 Bulan			120.000.000	12 Bulan	150.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Jumlah mebeleur	1 Paket			50.000.000	1 Paket	60.000.000
				Jumlah Peralatan PC dan Printer	1 Paket			100.000.000	1 Paket	120.000.000
				Jumlah Pengadaan meja dan kursi	1 Paket			100.000.000	1 Paket	120.000.000
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
			Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja lokal yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi						
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan kerajinan						
			Pelatihan Pembuatan Abon Ikan	Jumlah peserta pelatihan Pembuatan abon ikan	32 Orang	BLK		150.000.000	32 Orang	175.000.000

			Pelatihan Tata boga	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga	32 orang	BLK	150.000.000			32 orang	175.000.000
			Pelatihan/ Kursus Komputer	Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit	32 orang	BLK	150.000.000			32 orang	175.000.000
			Pelatihan Anyam Jaring Ikan	Jumlah Peserta Pelatihan Anyam Jaring Ikan	32 Orang	Wasior	150.000.000			32 Orang	175.000.000
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja		1 Paket						
				Pengadaan Komputer	35 Unit	BLK	875.000.000				
			Program Penempatan Tenaga Kerja								
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
			Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah peserta Penyuluhan dan bimbingan	200 Orang		250.000.000			200 Orang	275.000.000
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja diberdayakan melalui Program perluasan Kesempatan Kerja	2 Orang		50.000.000			2 Orang	60.000.000
			Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP yang diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan	4 Orang		100.000.000			4 Orang	120.000.000
			Program Hubungan Industrial								
			Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Terlaksananya tenaga kerja yang terdata							
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI ((PP/PKB. Struktur Skala upah, danLKS Biparti) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	13 Distrik		100.000.000			13 Distrik	120.000.000
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Pencegahan Perselisihan HI Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegat	2 Kasus		50.000.000			2 Kasus	50.000.000
			Pencegahan Perselisihan HI Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Jumlah Perkara Perselisihan	2 Kasus		30.000.000			2 Kasus	30.000.000

			yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang diselesaikan							
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
			Juran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan kematian Bagi Pekerja Rentan	Jumlah Pekerja rentan yang terlindungi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan kematian	3000 Orang	Teluk Wondma	604.800.000			3500 Orang	705.600.000
			Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi								
			Progrm Perencanaan Kawasan Transmigrasi								
			Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi								
			Penatausahaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen		400.000.000			1 Dokumen	400.000.000
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan							
			Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penempatan Transmigrasi							
			Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknis	50 KK		100.000.000			50 KK	120.000.000
			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mengikuti penyuluhan	50 KK		100.000.000			50 KK	120.000.000
			Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lahan Yang Terukur/terdata							
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi ang dilaksnakan Monitoring	2 Lokasi (	(Sp1 dan Sp2 Werianggi)	50.000.000			2 Lokasi	60.000.000
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase penduduk transmigrasi lokal yang diberdayakan							
			Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi							
			Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman								

			Pemberdayaan Masyarakat/Warga Transmigran melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah Warga Transmigran yang diberdayakan melalui pemanfaatan Lahan Pekarangan	250 KK	Sp1 dan Sp2 Werianggi)	750.000.000			250 KK	800.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat/Warga Transmigran melalui Ternak Ayam Potong dan Ayam Petelur	Jumlah Warga Transmigran yang diberdayakan melalui Ternak Ayam	25 KK	Sp1 dan Sp2 Werianggi)	750.000.000			25 KK	800.000.000
			Penguatan infrastruktur sosial ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman								
			Pembentukan Poktan	Jumlah Poktan Yang terbentuk	25 Kelompok	Sp1 dan Sp2 Werianggi)	150.000.000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Rasiei, Juni 2025

Kepala Dinas Transmigrasi Dan
Tenaga Kerja
Kab. Teluk Wondama


ADHAR S Pt
PEMBINA TK. I
NIP. 19710009 200605 1 001